

MENGHINDARI PSEUDO INFORMASI DALAM SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN

Ilham Gemiharto¹

Abstrak

Konsep pseudo informasi berasal dari pemikiran Terence Moran (1978), seorang profesor dalam bidang ekologi media mengenai pseudo komunikasi. Moran menyatakan bahwa pseudo komunikasi bersumber dari adanya pseudo informasi yang dibuat dengan tujuan tertentu, misalnya dalam bentuk propaganda. Kini dengan maraknya media sosial, pseudo informasi juga ditemukan dalam berbagai bentuk dan seringkali muncul dalam berbagai kesempatan, misalnya pada masa darurat kebencanaan. Sistem Informasi Kebencanaan merupakan sebuah sistem paduan antara prosedur, sumber daya manusia, data dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menganalisis informasi kebencanaan yang ditujukan untuk mendukung proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pra bencana, saat terjadinya bencana (tanggap darurat) maupun pasca terjadinya bencana. Tujuan pokok dari sistem informasi kebencanaan adalah melakukan diseminasi atau melalui mekanisme penyebaran pengetahuan dan informasi kebencanaan dalam rangkaian proses penanggulangan bencana yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan urgensi dan tingkat kebutuhan khalayak potensialnya. Seringkali pada situasi kebencanaan marak pseudo informasi yang cenderung menyesatkan bahkan membahayakan proses penanganan korban bencana. Pseudo informasi atau informasi semu kebencanaan seringkali muncul melalui beragam media sosial yang saat ini sudah begitu populer di Indonesia. Mengingat potensi bahaya yang dapat ditimbulkannya sudah selayaknya keberadaan pseudo informasi pada situasi kebencanaan harus segera diantisipasi sebelum menimbulkan bahaya lebih lanjut.

Kata kunci: *Pseudo informasi, sistem informasi kebencanaan, internet, media sosial.*

¹ Dosen Tetap di Program Studi Manajemen Komunikasi dan Mahasiswa Program Doktorat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

I. Pendahuluan

Indonesia terletak pada pertemuan lempeng tektonik aktif, jalur pegunungan aktif, dan kawasan beriklim tropik; sehingga menjadikan sebagian besar wilayahnya rawan terhadap bencana alam. Jumlah korban bencana tergolong sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Data terakhir menunjukkan adanya peningkatan, baik dalam hal jenis bencana, jumlah kerugian, dan jumlah korban jiwa. Belum lagi jumlah korban kerusakan social (social unrest) di Ambon, Pontianak, Aceh, dan Palu; yang jumlahnya sulit diketahui secara pasti akibat sumber data yang tidak seragam. Kesimpangsiuran data yang berkaitan dengan bencana merupakan tantangan yang harus segera diatasi. (Ecip, 2002)

Seringkali di tengah situasi bencana marak bermunculan pseudo informasi atau informasi semu yang terkadang menyesatkan. Di lokasi bencana pseudo informasi muncul secara

viral dari mulut ke mulut, sehingga membingungkan tim penolong sehingga menghambat proses evakuasi korban bencana. Pseudo informasi agak berbeda dengan isu atau gossip, karena biasanya didasari oleh fakta yang nampaknya logis namun apabila ditelusuri lebih lanjut ternyata tidak benar. (Saidi, 2015)

Pseudo informasi kebencanaan sering pula bermunculan di dunia maya, khususnya diantara para pengguna sosial media, mulai dari Blackberry Messenger, Whatsapp, Path, Instagram, Twitter dan Facebook. Dalam kasus jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501 jurusan Surabaya – Singapura pada 28 Desember 2014 lalu, di media sosial banyak bermunculan beragam pseudo informasi yang menyesatkan yang bukan saja membingungkan petugas penyelamat namun dan keluarga korban, namun juga mengganggu proses evakuasi korban bencana tersebut. (Kompas.com, 18 Januari 2015)

Contoh yang paling sederhana misalnya informasi mengenai pesan BBM dari salah satu Blackberry milik korban yang menyatakan dirinya selamat dari kecelakaan tersebut dan saat ini berada di Pulau Serutu di gugusan kepulauan Belitung. Namun setelah dicek ke lokasi ternyata tidak ada seorangpun korban yang selamat di pulau itu. Kemudian informasi foto yang dinyatakan sebagai jenazah korban yang sudah sangat memprihatinkan dengan anggota tubuh yang tidak lengkap yang diunggah ke sosial media, yang ternyata juga palsu. (Kompas.com, 18 Januari 2015)

II. Masyarakat Informasi

Information society atau masyarakat Informasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru (*new*

information and communication technologies (ICT's)). (Rogers, 1986)

Dalam masyarakat informasi orang akan mendapatkan keuntungan yang penuh dari teknologi baru dalam segala aspek kehidupan: Di tempat kerja, di rumah dan tempat bermain. Contoh dari ICT's adalah: ATM untuk penarikan tunai dan pelayan perbankan lainnya, telepon genggam (handphone), teletext television, faxes dan pelayan informasi seperti juga internet, e-mail, mailinglist, serta komunitas maya (virtual community) lainnya. (Naisbitt, 2001)

Pengertian lain dari information society atau masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat dimana produksi, distribusi dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Jadi dapat dikatakan bahwa pengolahan informasi adalah inti dari kegiatan masyarakat. (Rogers, 1986).

Teknologi baru ini memiliki implikasi untuk segala aspek dari masyarakat dan ekonomi kita, teknologi mengubah cara kita melakukan bisnis, bagaimana kita belajar, bagaimana kita menggunakan waktu luang kita. Ini juga berarti tantangan yang penting bagi pemerintah:

- Hukum kita perlu diperbaharui dalam hal untuk mendukung transaksi elektronik.
- Masyarakat kita perlu untuk dididik mengenai teknologi yang baru.
- Bisnis harus online jika mereka ingin menjadi sukses.
- Pelayanan pemerintah harus tersedia secara elektronik. (Bainbridge, 1993)

Masyarakat Informasi menghadapkan kita pada tantangan-tantangan baru dan kesempatan perkembangan-perkembangan menuju seluruh area dari masyarakat. Dampak dari teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi sebuah sefinisi sementara yang kuat, dan ini menstransformasi aktivitas

ekonomi dan sosial. Kunci yang penting dari jaringan teknologi dalam masyarakat informasi adalah teknologi membantu kita untuk membuat koneksi-koneksi baru. Koneksi-koneksi dimana tantangan tradisional menerima apa yang mungkin, dan ketika hal tersebut menjadi mungkin. Perkembangan masyarakat informasi telah menjadi bagian penting untuk masyarakat informasi sebagai ekonomi kecil yang terbuka di dalam pengembangan jaringan ekonomi global, dimana pengetahuan berbasis pada inovasi yang menjadi kunci sumber dari penopang keuntungan yang kompetitif. (Naisbitt, 2001)

Information and communication technologies (ICT) adalah penting untuk terwujudnya lingkungan ekonomi global yang berpengetahuan dan oleh karenanya memainkan peran yang penting dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan menghapus kemiskinan. (Naisbitt, 2001)

Potensi ICT untuk memberdayakan masyarakat sangat besar. Hal ini terutama dalam kasus untuk orang cacat, wanita, generasi muda dan pribumi. ICT dapat membantu membangun kapasitas dan keterampilan untuk menciptakan peluang kerja yang lebih banyak, membantu usaha kecil dan menengah, dan meningkatkan partisipasi serta menginformasikan pembuat keputusan pada setiap level melalui peningkatan pendidikan dan latihan, khususnya bila disertai dengan penghormatan sepenuhnya terhadap keanekaan bahasa dan budaya. (Giandita, 2010)

Inovasi teknologi dapat menyokong secara nyata untuk memberikan akses yang lebih baik kepada layanan kesehatan, pendidikan, informasi dan pengetahuan, sebagaimana juga menawarkan variasi sarana yang lebih luas dimana masyarakat dapat berkomunikasi, sehingga mendukung promosi pemahaman yang luas dan peningkatan

kualitas kehidupan warga dunia. (Giandita, 2010)

Salah satu ciri masyarakat informasi adalah adanya level intensitas informasi yang tinggi (kebutuhan informasi yang tinggi) dalam kehidupan masyarakatnya sehari – hari pada organisasi – organisasi yang ada, dan tempat– tempat kerja. Kemudian juga maraknya penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran dan bisnis, serta kegiatan– kegiatan lainnya melalui kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. (Rogers, 1986)

Perkembangan peradaban manusia terasa begitu cepatnya, kita tentunya mengenal masyarakat primitif, pada era itu seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus ditukar dengan barang lagi (barter), kemudian meningkat ke masyarakat agraris, kemudian masyarakat industri. Dari masyarakat industri loncat ke masyarakat informasi (era informasi). Mengapa dikatakan

loncat ke masyarakat informasi ? karena kita baru memulai melangkah ke masyarakat industri, era informasi sudah datang. Dengan era informasi ini, semuanya menjadi serba yaitu serba murah, cepat, tepat, dan akurat. Namun disamping itu ada sisi negatifnya, tergantung kita mau kemana melangkah. Contoh dengan era informasi ini seorang auditor dapat melakukan supervisi audit ditempat yang berbeda, melakukan transaksi bisnis melalui internet (e-commerce). Dan bisa juga menyerap informasi budaya yang jelek, yang dapat merubah perilaku dan etika seseorang. Oleh karena itu diperlukan sikap arif dalam menyikapi era informasi ini, kita tidak boleh terjebak perdebatan dampak positif dan negatifnya era ini, yang akhirnya mandeg dan tidak berubah. Yang harus kita bangun adalah kemauan untuk merubah diri.

III. Pseudo Informasi

Pseudo menurut Collins (2003) berarti semu, palsu, pura-pura, tiruan, tidak nyata, atau tidak benar. Pseudo informasi adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu informasi yang dapat diterima secara logika namun sebenarnya bukan merupakan informasi yang benar. Informasi ini tidak valid dan memiliki banyak kekurangan, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan cenderung meragukan. Dengan kata lain bisa disebut juga sebagai informasi semu atau palsu. (Moran, 1978)

Informasi semu ini bisa berupa macam-macam, apakah itu berupa isu, kabar burung, *hoax* dan lain-lain. Pada masa dahulu mungkin informasi semu ini bisa dianggap sebagai kebenaran. Namun setelah ditemukan banyak keraguan di dalamnya, maka nampaklah bahwa informasi tersebut tidak benar. Bagaimana membedakan antara informasi dan Pseudo informasi cukup sulit sebelum kita

menelaah informasi itu lebih lanjut. (Saidi, 2015)

Pada era internet ini sudah selayaknya kita mewaspadaai berkembangnya pseudo informasi. Namun sebaliknya kita juga harus tetap hati-hati karena menyatakan suatu informasi sebagai pseudo informasi dan menolaknya mentah-mentah mengandung resiko tersendiri apabila ternyata informasi tersebut benar. Karena itu penting untuk mewaspadaai agar kita tidak cepat menilai suatu informasi. Sebaiknya kita memahami logika dari informasi yang kita terima. Dengan mengerti secara mendalam kita bisa waspada dan tetap kritis namun tidak melakukan penolakan tanpa dasar. Karena itu sikap terbuka dan kritis tetaplah penting. (Saidi, 2015)

IV. Manajemen Bencana

Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan

manusia maupun dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan dan melampaui batas kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. (Damayanti, 2011)

Manajemen bencana mempunyai tujuan untuk mengurangi, atau mencegah, kerugian karena bencana, menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana, dan mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Dengan demikian, siklus manajemen bencana memberikan gambaran bagaimana rencana dibuat untuk mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana, bagaimana reaksi dilakukan selama dan segera setelah bencana berlangsung dan bagaimana langkah-langkah diambil untuk pemulihan setelah bencana terjadi. (Harijono, 2011)

Secara garis besar terdapat empat fase manajemen bencana. Yang pertama adalah

Fase Mitigasi, yaitu upaya memperkecil dampak negative bencana. Misalnya dengan memberlakukan sistem zonasi dan pengaturan bangunan (*building codes*), analisis kerentanan; pembelajaran publik. Fase kedua adalah Fase *Preparedness*, maksudnya merencanakan bagaimana menanggapi bencana, dengan merencanakan kesiagaan, latihan keadaan darurat, system peringatan. Fase ketiga adalah Fase Respon, dimana dilakukan upaya memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh bencana dengan melakukan pencarian dan pertolongan serta tindakan darurat. Sedangkan fase terakhir adalah Fase Recovery, dengan cara mengembalikan masyarakat ke kondisi normal. Misalnya memberikan perumahan sementara, bantuan keuangan; perawatan kesehatan. (Saptono, 2011)

Keempat fase manajemen bencana tersebut tidak harus selalu ada, atau tidak secara terpisah, atau tidak harus

dilaksanakan dengan urutan seperti tersebut diatas. Fase-fase sering saling overlap dan lama berlangsungnya setiap fase tergantung pada kehebatan atau besarnya kerusakan yang disebabkan oleh bencana itu. Dengan demikian, berkaitan dengan penentuan tindakan di dalam setiap fase itu, kita perlu memahami karakteristik dari setiap bencana yang mungkin terjadi. (Saptono, 2011)

V. Sistem Informasi Kebencanaan

Sistem Informasi Kebencanaan merupakan sebuah sistem paduan antara prosedur, sumber daya manusia, data dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menganalisis informasi kebencanaan yang ditujukan untuk mendukung proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pra bencana, saat terjadinya bencana (tanggap darurat) maupun pasca terjadinya bencana. Informasi

kebencanaan disebarluaskan secara berjenjang sesuai dengan urgensi dan tingkat kebutuhan khalayak potensialnya. Informasi kebencanaan meliputi potensi dan zona bencana, penanganan korban bencana, distribusi logistik, mobilisasi dan koordinasi relawan, serta pengelolaan kerjasama dan partisipasi masyarakat luas dalam menanggapi bencana. (Nasarudin, 2010)

Tujuan pokok dari sistem informasi kebencanaan adalah melakukan diseminasi atau melalui mekanisme penyebarluasan pengetahuan dan informasi kebencanaan dalam rangkaian proses penanggulangan bencana yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan urgensi dan tingkat kebutuhan khalayak potensialnya. Proses ini dilaksanakan secara terencana dan sistematis melalui berbagai media dan metoda komunikasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengetahuan dan informasi kebencanaan tersebut

akan mudah diakses sesuai dengan urgensi dan tingkat kebutuhan khalayak potensialnya dan memiliki daya guna dalam menciptakan perubahan, pengambilan keputusan serta pengambilan tindakan segera terkait dengan proses penanggulangan bencana. (Nasarudin, 2011)

Pengelolaan informasi kebencanaan yang dilaksanakan oleh Disasters Information Center secara umum akan melayani 4 (empat) kelompok khalayak sasaran, yaitu Pemerintah Daerah (Dalam kerangka sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam proses penanggulangan bencana), Korban Bencana (Masyarakat sekitar lokasi bencana yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak bencana), Media Massa (Elemen penghubung distribusi informasi ke masyarakat umum), dan Masyarakat Umum (Setiap individu yang secara asasi berhak memperoleh informasi publik sekaligus memiliki hak dan

kewajiban berpartisipasi dalam proses penanggulangan bencana). (Nasarudin, 2011)

Berdasarkan teori dan konsep manajemen bencana (disasters management) yang meliputi beberapa tahapan, yaitu: tahap tanggap darurat (response phase), tahap rekonstruksi dan rehabilitasi, tahap preventif dan mitigasi, dan tahap kesiapsiagaan (preparedness); maka upaya penanggulangan bencana harus didukung oleh suatu sistem informasi yang memadai. Sistem ini diharapkan mampu untuk: (1) meningkatkan kemampuan perencanaan penanggulangan bencana bagi semua mekanisme penanggulangan bencana, baik pada tingkat pusat maupun daerah pada semua tahapan penanggulangan bencana; (2) mendukung pelaksanaan pelaporan kejadian bencana secara cepat dan tepat, termasuk di dalamnya proses pemantauan dan perkembangan kejadian bencana; dan (3) memberikan informasi secara lengkap dan

aktual kepada semua pihak yang terkait dengan unsur-unsur penanggulangan bencana baik di Indonesia maupun negara asing melalui fasilitas jaringan global. (Wattegama, 2007)

Penanganan sistem informasi kebencanaan perlu mendapatkan perhatian yang besar dan pengelolaan secara profesional. Hal ini didasari oleh alasan bahwa: (1) Pengumpulan data menghabiskan biaya yang sangat besar; (2) Berbagai perencanaan/managemen bencana menuntut tersedianya data dan informasi secara cepat, akurat, dan terintegrasi; dan (3) Basisdata digital memiliki kelebihan dalam hal penyimpanan, pemrosesan, analisa, dan pemutakhiran. Data kebencanaan yang mempunyai rujukan spasial dan temporal memerlukan sebuah sistem untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaannya. Sistem Informasi Bencana yang berbasis GIS sebagai suatu sistem komputerisasi dengan empat kemampuan untuk menangani

data bereferensi geografis, yaitu: pemasukan, pengelolaan atau manajemen data (penyimpanan dan pengaktifan kembali), manipulasi dan analisis, serta keluaran; sangatlah tepat untuk diterapkan. Sekarang ini, GIS juga sudah dapat diimplementasikan sedemikian rupa sehingga dapat bertindak sebagai map-server yang siap melayani permintaan (query) dari user melalui jaringan lokal (intranet) maupun jaringan internet (web-based). Pekerjaan tidak lagi terbebankan pada satu sistem komputer dengan mengoptimalkan peran clients dan server. (Wattegama, 2007)

Sebagai suatu sistem, Sistem Informasi Bencana terintegrasi dengan jaringan komputer lain dan disusun oleh komponen-komponen pembentuk: (1) komponen perangkat keras, meliputi: server, PC user, digitizer, peralatan pendukung jaringan; (2) komponen sistem operasi berupa: WinNT, Linux, atau UNIX; (3) komponen perangkat

lunak pengolah data spasial, misalnya: ArcInfo, ArcView, MapInfo, AutoCAD Map, atau yang terintegrasi dengan pengolah citra, seperti: ILWIS, ERMapper, ENVI, ERDAS; (4) komponen perangkat lunak pengolah data atribut, misalnya: dBase, Access, SQL, Oracle; (5) komponen basisdata yang terdiri dari tabel-tabel berikut relasi antar tabel; (6) komponen perangkat lunak pendukung internet mapping; (7) organisasi pengelola; (8) komponen pengguna sistem yang dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu: database administrator sebagai pengendali sistem, application programmer, dan pengguna; dan (9) operasionalisasi sistem. (Nappi et.al., 2008)

Sebagian besar aktivitas dititikberatkan pada identifikasi pengorganisasian data spasial kebencanaan yang sudah ada beserta analisis kebutuhan di masa mendatang. Selain itu juga dilakukan evaluasi kelayakan berupa estimasi biaya dan potensi

keuntungan yang bakal diperoleh. Selanjutnya dipersiapkan secara detail rencana implementasi, rancangan sistem, dan rancangan basisdata yang akan dibangun. Rencana implementasi berisi deskripsi tugas, alokasi sumberdaya, identifikasi rencana hasil akhir, dan time schedule. Perancangan sistem menyangkut pemilihan perangkat keras dan lunak. Perancangan basisdata tabuler menggunakan model ER (entity relationship). (Nappi et.al., 2008)

Selanjutnya dilakukan terhadap sistem melalui akuisisi sistem, akuisisi basisdata, pengorganisasian sistem, persiapan prosedur operasi, dan persiapan lokasi. Melalui akuisisi sistem diharapkan dapat dipilih perangkat keras dan lunak pendukung Sistem Informasi Bencana yang paling efektif dengan biaya serendah mungkin. Pada pengorganisasian sistem, kendala yang seringkali dihadapi adalah kebutuhan personel pendukung dan skill. Berkaitan dengan hal ini sudah dilakukan

sosialisasi dan pelatihan bagi para manager/staff Satkorlak Penanggulangan Bencana. Persiapan prosedur operasi menyangkut penentuan prosedur manajemen sistem, seperti: operasi harian, pemeliharaan peralatan, serta pengalokasian wewenang penggunaan perangkat sistem dan akses data. (Nappi et.al., 2008)

Setelah sistem dianggap siap dilakukan instalasi sistem dan pembuatan pilot project. Instalasi sistem mencakup pemasangan dan pengujian sistem, baik secara terpisah maupun terhubung dalam jaringan internet. Proyek percontohan perlu diujicobakan pada lembaga pusat Bakornas PBP dan beberapa Satlak/Satkorlak. Pada setiap periode tertentu, keberadaan sistem sebaiknya ditinjau kembali untuk memonitor relevansinya. Jika hasil review menunjukkan adanya pergeseran sistem dari tujuan semula, maka diperlukan perbaikan dan atau perluasan sistem (system expansion). (Nappi et.al., 2008).

Setelah sistem siap maka dilakukan akuisisi basisdata dengan cara melakukan pengkonversian data spasial (peta) dan data atribut kebencanaan yang masih berupa data analog ke dalam format digital. Data atribut kebencanaan diklasifikasi, diolah, dan diotomasi dengan pemberian identitas (ID) menggunakan SQL. Selanjutnya dilakukan pengintegrasian data atribut ke dalam peta digital dengan bantuan perangkat lunak pengolah data spasial yang mempunyai fasilitas pertukaran data secara dinamis melalui container OLE maupun driver ODBC, misalnya ArcView, AutoCAD Map, atau MapInfo. (Nappi et.al., 2008)

Dari subsistem ini akan dihasilkan keluaran yang menampilkan atau menghasilkan produk akhir basisdata, seperti: tabel, grafik, peta, dan lain-lain. Sesuai dengan rencana semula bahwa keluaran basisdata kebencanaan ini akan dipublikasikan secara luas di internet melalui media sosial sehingga dapat diakses melalui

berbagai perangkat yang memiliki akses internet seperti smartphone yang berbasis Android, Blackberry, iOS, maupun Windows, sehingga segala informasi penting kebencanaan dapat diakses secara realtime dan memudahkan proses penanggulangan bencana yang tengah berjalan. (Nappi et.al., 2008)

VI. Menghindari Pseudo Informasi Melalui Sistem Informasi Kebencanaan

Pada saat terjadi bencana, di media sosial banyak beredar beragam pseudo informasi yang menyesatkan, dan biasanya diiringi dengan himbuan untuk menyebarkannya (surat berantai). Sebetulnya pseudo informasi hanya memanfaatkan sisi psikologis dari pemakai internet, misalnya menakut-nakuti ancaman tertentu atau memberi janji/harapan hadiah tertentu jika informasi itu dikirim sebanyak-banyaknya ke kontak yang dimiliki. Bahkan beberapa pseudo

informasi mencantumkan ayat-ayat dari kitab suci atau dengan kata-kata bijaksana dan berkesan, namun juga disertai ancaman apabila tidak menyebarkannya. Ciri khas dari informasi seperti ini adalah adanya himbuan untuk memforward berita itu sebanyak-banyaknya. Untuk memperkuat legitimasinya, dia akhir pesan, si pengirim mengaku berasal dari badan resmi negara atau perusahaan bonafid tertentu. (Saidi, 2015)

Di negara-negara maju fenomena seperti ini sudah lumrah terjadi dan para pengguna media sosial sudah terbiasa untuk mengabaikannya. Namun di Indonesia yang penduduknya memiliki tingkat literasi yang lebih rendah, seringkali pseudo informasi dianggap sebagai kebenaran, karena takut dengan ancamannya atau menginginkan imbalan tertentu. (Saidi, 2015)

Untuk menghindari maraknya pseudo informasi dalam situasi darurat kebencanaan diperlukan

beberapa langkah-langkah strategis yang menuntut kerjasama semua pihak yang berkepentingan. Sistem informasi kebencanaan yang telah menggunakan teknologi internet harus dapat mengantisipasi timbulnya kesimpangsiuran informasi kebencanaan yang diakibatkan oleh maraknya pseudo informasi yang beredar di masyarakat melalui media sosial. (Adrianus, 2007)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan SAR Nasional (Basarnas) di tingkat Pusat maupun Daerah dapat membentuk semacam Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana yang memiliki seorang juru bicara yang berfungsi sebagai Public Relation terhadap semua informasi mengenai bencana yang terjadi. Jadi selain Juru Bicara, anggota tim lainnya tidak berhak untuk mengeluarkan keterangan apapun kepada masyarakat. Arus informasi mengalir melalui satu pintu saja, sehingga tidak menimbulkan

kesimpangsiuran yang diakibatkan oleh pernyataan yang berbeda diantara para pejabat yang berwenang. (BNPB, 2015)

Dalam kasus kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501, fungsi Public Relations ini masih belum berjalan dengan baik. Setiap pejabat berwenang nampaknya berusaha menunjukkan kinerjanya melalui berbagai informasi dan pernyataan yang terkadang bertentangan satu sama lain, sehingga masyarakat dibuat kebingungan. Sudah semestinya informasi kebencanaan hanya keluar dari satu pintu saja yaitu juru bicara Tim Koordinator Penanggulangan Bencana yang saat ini dipegang langsung oleh Kepala Basarnas. (Kompas Cetak, 18 Januari 2015)

VII. Penutup

Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah maju, Indonesia masih memiliki kekurangan dalam Sistem Informasi Kebencanaan yang dimilikinya. Selain kendala

alam berupa wilayah kepulauan Nusantara yang demikian luas, sumber daya manusia yang tersedia pun masih kurang memadai untuk menghadapi berbagai macam bencana dengan skala menengah hingga besar. Hal ini nampak dalam peristiwa kecelakaan pesawat Air Asia QZ 8501, dimana masih terjadi kesimpangsiuran data kebencanaan khususnya pada tahap awal proses evakuasi korban. Kondisi tersebut juga diperburuk dengan begitu maraknya pseudo informasi yang cenderung membingungkan bahkan menyesatkan mengenai bencana tersebut, karena beberapa diantaranya terlanjur dipercaya sebagai kebenaran.

Sudah waktunya Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana membangun Sistem Informasi Kebencanaan yang tangguh dan terintegrasi secara online melalui fasilitas internet. Pemanfaatan website dan media sosial juga akan meminimalisir timbulnya pseudo informasi yang

disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dapat dijadikan contoh bagaimana Jepang mengelola Sistem Informasi Kebencanaan pada saat terjadi bencana Tsunami di Fukushima pada tahun 2011. Meskipun jumlah korban sangat besar, yaitu 28 ribu jiwa tewas dan hilang, namun tidak ada kesimpangsiuran informasi yang terjadi, tidak ada tayangan jenazah korban di media, dan tidak ada ketergantungan terhadap bantuan pihak asing dalam memulihkan kembali infrastruktur pasca bencana. Dengan peran serta semua pihak, semoga untuk ke depannya Sistem Informasi Kebencanaan Nasional dapat semakin lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Adrianus. 2007. Pelaksanaan Civic Mission Dalam Penanggulangan Bencana Alam Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2008. Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Penanggulanangan Bencana.
- Bainbridge, David I. 1993. Komputer dan Hukum (alih bahasa oleh Drs. Prasadi T. Susmaatmadja), Jakarta : Sinar Grafika.
- Damayanti, Doty. 2011. Manajemen Bencana Mendorong Mitigasi Berbasis Risiko dalam Bencana Mengancam Indonesia. Ed. Irwan Suhanda. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Ecip, S. Sinansari. 2002. Rusuh Poso Rujuk Malino. Jakarta: Cahaya Timur.
- Gianditta, 2010. Aplikasi dan Potensi TIK dalam Pendidikan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Harijono, Try. 2011. Mitigasi Bencana Tenaga Terlatih Diabaikan dalam Bencana Mengancam Indonesia. Ed. Irwan Suhanda. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Moran, Terence P. 1978. Propaganda as Pseudocommunications. New York: New York University.
- Moran, Terence P. 2010. Introduction to the History of Communication: Evolutions & Revolutions. New York: Peter Lang Publishing, Inc.
- Naisbitt, John, Nana Naisbitt, Douglas Philips. 2001. High Tech and High Touch: Technology and Our Search for Meaning (Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi). Bandung: Mizan Media Utama.
- Nappi R, Alessio G, Bronzino G, Terranova C, Vilaro G, 2008. Contribution of the SISCam Web-based GIS to the Seismotectonic Study of Campania (Southern Apennines) Springer.
- Nasaruddin, K. Munadi, M. Dirhamsyah, 2010. Design of Disaster Risk Management Information System in Aceh Province. Prosiding AIWEST-DR 2010.
- Nasaruddin, K. Munadi, M. Dirhamsyah, D. Yuliansyah, 2011, A Web-based Geographic Information System for Aceh Natural Hazards. Jurnal Telkomnika Vol.9, No. 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Rogers, Everett M. 1986. *Communication Technology- The New Media in Society*, The Free Press. New York: Macmillan, Inc.

Saidi, Acep Iwan. 2015. *Tubuh Digital, Tradisi Lisan Tersier*. Jakarta: Kompas Cetak.

Saptono, Hariadi. 2011. *Mitigasi Bencana Memperkuat “Jembatan” Maridjan – Surono dalam Bencana Mengancam Indonesia*. Ed. Irwan Suhandi. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Wattegama, C. 2007. *ICT for Disaster Management*. Asia-Pacific Development Information Programme.

Surat Kabar:

Kompas Cetak, 18 Januari 2015

Kompas Cetak, 02 Januari 2015

Media Online:

Detik.com

Kompas.com

Okezone.com

Republika.co.id

Tempo.co

Vivanews.co.id